



SALINAN

GOVERNOR SUMATRA UTARA
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF SUMATRA UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2017

ABOUT

REVISION OF REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE OF THE PROVINCE OF SUMATRA UTARA
YEAR 2017 BUDGET

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR SUMATRA UTARA,

- Menimbang : a. that based on Article 316 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 Year 2014 about Regional Government stating that Regional APBD can be done if there is development that does not match with KUA assumption, conditions that cause must be done budget shift between units, organizations, inter-activities, and inter-types of expenditure, conditions that cause remaining more budget calculation year before must be used for financing in year budget running, conditions urgent and/or conditions outside normal;
- b. that based on Article 317 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 Year 2014 about Regional Government stating that Regional Head submitting draft Regional Regulation about Revision APBD as intended in Article 316 paragraph (1) accompanied by explanation and supporting documents to DPRD to obtain joint approval;
- c. that based on consideration as intended in letter a and letter b, need to establish Regional Regulation about Revision Regional Revenue and Expenditure of the Province of Sumatra Utara Year 2017;
- Mengingat : 1. ~~Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atieh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103),~~

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017, adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp.	12.170.582.105.913,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	246.843.338.901,00	
c. Jumlah Pendapatan setelah perubahan			Rp. 12.417.425.444.814,00
2. Belanja			
a. Semula	Rp.	13.034.684.291.945,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	429.680.427.330,00	
c. Jumlah Belanja setelah perubahan			Rp. 13.464.364.719.275,00
Surplus/Defisit			Rp. (1.046.939.274.461,00)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	942.102.186.032,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	225.246.868.429,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan			Rp. 1.167.349.054.461,00
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	78.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	42.409.780.000,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan			Rp. 120.409.780.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan			Rp. 1.046.939.274.461,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp.	4.925.627.725.733,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	135.169.079.793,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp. 5.060.796.805.526,00

b.	Dana Perimbangan			
1)	Semula	Rp.	7.235.420.477.680,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	98.102.737.328,00	
	Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan			Rp. 7.333.523.215.008,00
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1)	Semula	Rp.	9.533.902.500,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	13.571.521.780,00	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan			Rp. 23.105.424.280,00
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Pajak Daerah			
1)	Semula	Rp.	4.486.811.919.686,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	64.716.086.554,00	
	Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan			Rp. 4.551.528.006.240,00
b.	Retribusi Daerah			
1)	Semula	Rp.	33.959.567.600,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	86.786.500,00	
	Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan			Rp. 34.046.354.100,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1)	Semula	Rp.	277.500.967.496,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	18.838.321.743,00	
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan			Rp. 296.339.289.239,00
d.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
1)	Semula	Rp.	127.355.270.951,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	51.527.884.996,00	
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan			Rp. 178.883.155.947,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp.	567.882.964.200,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	59.954.798.808,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan	Rp.		627.837.763.008,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	2.638.744.012.480,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(9.519.467.480,00)	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp.		2.629.224.545.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	4.028.793.501.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	47.667.406.000,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp.		4.076.460.907.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp.	9.533.902.500,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.363.702.500,00)	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp.		7.170.200.000,00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp.		0,00

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	15.935.224.280,00	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya setelah perubahan	Rp.		15.935.224.280,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula

Rp. 8.661.188.766.255,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. (101.058.694.764,00)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan

Rp. 8.560.130.071.491,00

b. Belanja Langsung

1) Semula

Rp. 4.373.495.525.690,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 530.739.122.094,00

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan

Rp. 4.904.234.647.784,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula

Rp. 3.037.330.274.182,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 330.267.907.977,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp. 3.367.598.182.159,00

b. Belanja Hibah

1) Semula

Rp. 3.620.208.919.358,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. (474.591.525.338,00)

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan

Rp. 3.145.617.394.020,00

c. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula

Rp. 1.982.455.818.915,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 47.014.922.597,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan

Rp. 2.029.470.741.512,00

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula

Rp. 2.443.753.800,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan

Rp. 2.443.753.800,00

e.	Belanja Tidak Terduga			
1)	Semula	Rp.	18.750.000.000,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(3.750.000.000,00)	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp. 15.000.000.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a.	Belanja Pegawai			
1)	Semula	Rp.	121.913.822.523,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.788.674.359,00	
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp. 128.702.496.882,00
b.	Belanja Barang dan Jasa			
1)	Semula	Rp.	2.154.412.516.769,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	499.985.411.138,00	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan			Rp. 2.654.397.927.907,00
c.	Belanja Modal			
1)	Semula	Rp.	2.097.169.186.398,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	23.965.036.597,00	
	Jumlah Belanja Modal setelah perubahan			Rp. 2.121.134.222.995,00
Pasal 4				
(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a.	Penerimaan Pembiayaan			
1)	Semula	Rp.	942.102.186.032,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	225.246.868.429,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan			Rp. 1.167.349.054.461,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan			
1)	Semula	Rp.	78.000.000.000,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	42.409.780.000,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan			Rp. 120.409.780.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

1) Semula	Rp.	942.102.186.032,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	225.246.868.429,00

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya setelah perubahan Rp. 1.167.349.054.461,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	78.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	42.409.780.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. 120.409.780.000,00

Pasal 5

Uraian Lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Provinsi dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Provinsi; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Selain keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi dan masyarakat; dan
 - c. program dan kegiatan lain yang anggarannya harus tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 26 Oktober 2017
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan

pada tanggal 26 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

IBNU SRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 10